
Bentuk Integrasi Sosial Dua Belas Anak Suku di Tana' Luwu, Sulawesi Selatan

Mandi Tandi Pare¹, Dwia Aries Tina Pulubuh², Suparman Abdulla³, Sakaria Sakaria⁴

^{1,2,3,4}Sociology Doctoral Program Student, Hassanuddin University

e-mail: ¹m.tandipare76@gmail.com, ²tpulubuhu@gmail.com, ³mansosio87@yahoo.com,

⁴sakaria@unhas.ac.id

Diterima	01	Maret	2024
Disetujui	24	Desember	2024
Dipublish	24	Desember	2024

Abstract

This study aims to understand the form of social integration that occurred among twelve tribal children in Tana' Luwu, South Sulawesi. Social integration is an important process in people's lives, especially in the context of societies consisting of various tribes. In this study, we used a qualitative approach by collecting data through interviews, observation and documentation. The results showed that the occurrence of social integration in twelve tribal children in Tana' Luwu was caused by high tolerance, economic equality, the formation of a social control system. In addition, the occurrence of social integration is also influenced by the role of institutions (both formal and informal) together with agents (actors) to form a social system in common life which is then carried out social control by institutions and actors in order to maintain and maintain social integration. This research provides a deeper understanding of the form of social integration among twelve tribal children in Tana' Luwu, South Sulawesi. The results of this research can be the basis for the development of programs aimed at increasing social integration in heterogeneous societies such as Tana' Luwu. In addition, this research can also be a reference for future research in the field of social integration in Indonesia.

Keywords: *Social Integration, Plural Society, Actors, Indigenous Institutions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk integrasi sosial yang terjadi di antara dua belas anak suku di Tana' Luwu, Sulawesi Selatan. Integrasi sosial merupakan proses yang penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat yang terdiri dari berbagai suku. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya integrasi sosial pada dua belas anak suku di Tana' Luwu disebabkan oleh tingginya sikap toleransi, terjadinya pemerataan ekonomi, terbentuknya sistem pengendali sosial. Selain itu terjadinya integrasi sosial juga dipengaruhi oleh adanya peran lembaga (baik formal maupun informal) bersama agen (aktor) membentuk sistem sosial dalam kehidupan bersama yang selanjutnya dilakukan pengendalian sosial oleh lembaga dan aktor dalam rangka menjaga dan memelihara integrasi sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk integrasi sosial di antara dua belas anak suku di Tana' Luwu, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar

534



untuk pengembangan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi sosial di masyarakat yang heterogen seperti Tana' Luwu. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang integrasi sosial di Indonesia.

Kata kunci: Integrasi Sosial, Masyarakat Majemuk, Aktor, Lembaga Adat

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat kompleks. Kompleksitas itu terutama tercermin dari banyaknya suku, budaya, bahasa dan agama yang menyertainya. Masyarakat semacam itu merupakan suatu fenomena unik dan menarik yang menyertai perjalanan bangsa ini, tetapi juga bisa menjadi pangkal konflik seperti yang banyak terjadi sejak dahulu hingga kini. Hal tersebut terlihat pada dinamika hubungan sosial melalui peristiwa konflik Poso, Sulawesi Tengah yang terjadi dalam kurun waktu 1998-2005 dan Konflik yang terjadi di Maluku antara tahun 1999 sampai 2002.

Kemajemukan ini bisa berdampak positif dan negatif. Berdampak positif terjadi apabila kemajemukan itu dikelola dengan baik akan semakin memperkuat integrasi sosial bangsa, sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik maka menyebabkan konflik karena masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang rentan dengan konflik sosial.

Integrasi dalam struktur masyarakat yang majemuk bukan berarti meniadakan keragaman kultural masing-masing kelompok sosial, tetapi integrasi merupakan aktivitas yang ditujukan pada penyatuan antar kelompok yang beragam dalam wadah kesatuan sosial yang disebut bangsa. Oleh karenanya, negara sebagai organisasi sosial terbesar hanya sebatas menjadi wadah atas berbagai keragaman antar kelompok, tidak menyeragamkannya.

Dengan demikian, pengintegrasian suatu bangsa tetap dibidikkan pada penyatuan antar kelompok suku bangsa, ras, agama, antar daerah, adat istiadat yang perbedaannya tetap dijaga keragamannya (Elly M & Usman, 2011:574). Dalam membentuk masyarakat yang majemuk, untuk mempersatukannya bukan dilakukan penyeragaman tetapi bagaimana menjaga keragamannya merupakan kunci terciptanya integrasi sosial. Oleh sebab itu, apakah kondisi integrasi sosial yang terjadi di Tana' Luwu di mana masyarakatnya majemuk dapat hidup harmonis dan aman dengan keberagaman?.

Bahwa interaksi sosial intra dan inter dua belas anak suku di Tana' Luwu, tentu dalam proses sosial terdapat asosiatif (kerjasama, akomodasi, akulturasi) maupun proses disosiatif (persaingan, kontravensi dan konflik/pertentangan), baik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang kemungkinan berbeda etnik tersebut, melalui berbagai aspek kehidupan seperti: lembaga pendidikan, adat-istiadat, keagamaan, perkawinan, budaya gotong royong dalam lingkungan bertetangga, olahraga, seni, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan dari berbagai kalangan dua belas anak suku di Tana' Luwu dapatlah diuraikan bentuk-bentuk interaksi sosial yang mengarah pada integrasi sosial dalam berbagai bentuk



aktivitas dan lingkungan.

Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas. Wilayah kerajaan Luwu membentang dari belahan utara Teluk Bone dan memanjang dari Tana Toraja ke utara Sulawesi Tengah. Dwia Aries Tina Pulubuh, (2020), Kerajaan Luwu' berakhir pada tahun 1959, H.M Sanusi Dg (Mattata, (1967:21), ditandai dengan digantikannya sistem kerajaan dengan sistem pemerintahan republik. Pada saat itu sistem self-governing territory di Sulawesi, termasuk Luwu, diganti menjadi Daerah Tingkat II. Luwu terdiri atas tiga kawedanan, yaitu Palopo, Masamba, dan Malili dengan kepala daerah Datu Andi Djemma hingga 1960. Kekuasaan Datu Luwu sebagai pemimpin politik dan pemerintahan berakhir ketika Luwu' menjadi kabupaten pada 1962. Wilayahnya terdiri atas kecamatan dan desa.

Baperlu, 2002:11, sejak zaman kerajaan, masyarakat Luwu' sangat heterogen karena cakupan wilayahnya menjangkau Sulawesi bagian selatan, tenggara, dan tengah. Setiap wilayah ditempati oleh suku masing-masing dengan bahasa tersendiri. Ada dua belas anak suku (kelompok etnis) dengan Sembilan bahasa daerah, yaitu bahasa To Ware, To Raya (Toraja), To Ala, To Rongkong, To Seko Rampi, To Sassa, To Wotu, To Pamona, To Padoe, To Baree, To Mengkoka, dan To Bajoe. Bahasa sebagai pengikat yang umum dipakai adalah bahasa Wara-Luwu atau Tae, dan bahasa bugis.

Tentu, kemajemukan masyarakat di Tana' Luwu merupakan "mutiara" yang harus tetap dijaga dengan membangun integrasi sosial masyarakatnya, sehingga konflik dapat diminimalisir. Integrasi sosial dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat saling

menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi maupun politik. Dalam konteks ini, integrasi sosial tidak selamanya menghilangkan diferensiasi tetapi yang terpenting adalah memelihara kesadaran untuk menjaga keseimbangan hubungan.

Teori integrasi sosial lainnya dikemukakan oleh Weber yang secara implisit dianggap penting dalam membangun integrasi sosial adalah soal legitimasi. Jika pihak yang dikuasai (subordinate) menarik (withdraw) legitimasinya terhadap penguasa, maka cenderung terjadi konflik sosial. Sementara itu, penarikan legitimasi itu sendiri berkaitan pula dengan berbagai masalah lainnya seperti kesenjangan (dalam hal ekonomi, politik, sosial atau wealth, power and pertige). Legitimasi juga berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dianggap sah disebut sebagai otoritas (authority).

Adanya otoritas ini sangat penting dalam mewujudkan integrasi sosial, termasuk dalam organisasi atau birokrasi (Dewi, 2007). Terjadinya integrasi sosial antar dua belas anak suku) di Tana' Luwu menurut teori Weber disebabkan adanya kelembagaan atau disebut dengan istilah 'struktur birokrasi' dan 'rasionalisasi nilai-norma'. Weber, punya perhatian pada realitas sosial seperti konsep 'kharisma' yang melembaga; konsep 'birokrasi' yang terstruktur, serta pandangan individu, bahwa 'manusia memiliki pikiran rasional dan pemikirannya itu menciptakan perbedaan atau deferensial).

Emile Durkheim, (1915) melontarkan gagasannya tentang fakta sosial, yaitu fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir dan merasakan yang mengendalikan individu. Mengenai cara bertindak itu dijelaskannya,



adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak yang dapat melakukan paksaan dari luar terhadap individu seperti hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian dan kaidah (Taufik & Leeden, 1986).

Dengan demikian berarti, bahwa sepanjang kehidupan masyarakat itu ada interaksi, yaitu antara yang memberi dan yang menerima atau antara yang dari luar/memberi dan dari dalam/dipaksa/menerima. Dari pengertian ini terlihat, bahwa di satu sisi integrasi sosial ini memandang peranan individu dalam hakekat interaksi sebagai pembentuk masyarakat. Dari masyarakat itu sendiri, bukanlah dipandang sebagai yang berdiri sendiri lepas individu sebagaimana yang dikatakan Emile Durkheim, (1947) dengan fakta sosialnya, tetapi sebaliknya tetap sebagai subjektivitas manusia, sebagai pembentuk masyarakat, yang oleh (Cooley, 1909) dikatakan bahwa, masyarakat dan individu bukan dua realitas yang berdiri terpisah, melainkan dua sisi atau segi dari realitas yang satu dan sama.

Keduanya adalah bagaikan kedua sisi keping uang yang tidak mungkin dipisahkan. Veeger, (1990:107) menekankan bahwa hidup itu dapat dipandang dari segi individualitasnya, atau dari segi sosialitasnya, dari segi keunikannya sejauh pada tiap-tiap orang ada hal-hal yang tidak ada pada orang lain, atau dari segi kesamaannya dengan orang lain.

Dari pendapat tersebut, dapat diambil pengertian, bahwa masyarakat merupakan proses interaksi, dan proses itu berlangsung terus menerus sesuai dengan interaksinya antara individu sebagai komponen dari masyarakat. Peranan individu sebagai pemberi definisi, penilaian dan sekaligus pemberi pemetaan terhadap realitas sosial. Dan kalau ditelusuri, ternyata interaksi telah

berlangsung dari dulu melalui simbol-simbol, sebab komunikasi melalui simbol merupakan kemampuan manusia melebihi kemampuan mahluk lain. Manusia sebagai mahluk Tuhan yang paling sempurna, dengan akal pikirannya mampu menciptakan simbol-simbol dan mampu menginterpretasikannya dengan berprilaku sesuai dengan interpretasi itu.

Hal ini oleh Mead, (1934) dikatakan bahwa interaksionisme melalui simbol-simbol memberi arti penting bagi penyebab interaksi. Dengan begitu akan terlihat bagaimana orang secara mental menciptakan makna dan simbol, akan tetapi pada bagaimana cara mereka mempelajari interaksi pada umumnya dan selama sosialisasi pada khususnya. (Richard & Borin, 1996) mengaskan bahwa manusia dapat menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan sesuatu mengenai dirinya.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa integrasi interaksional itu meliputi integrasi antar dua belas anak suku di Tana' Luwu dan masyarakat lainnya atau sebaliknya baik dalam bentuk integrasi yang bersifat individual, dengan pengertian sejauh mana anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda itu ambil bagian dalam masyarakat, dan integrasi kolektif yang dengan pengertian sejauh mana pula anggota-anggota individu masih memperlihatkan partisipasi dalam kelompok etnisnya, dimana pada tingkat-tingkat tertentu kelompok tersebut masih punya kekuasaan terhadap anggotanya.

Teori lainnya mengkaji tentang integrasi sosial adalah paradigma fungsionalisme struktural, yang memandang masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari unit atau bagian yang saling terkait dan tergantung sama lain. Selanjutnya fungsionalisme



struktural memandang masyarakat itu hanya mungkin ada dan berlanjut apabila ada struktur atau institusi tertentu dalam masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan (needs) dari suatu masyarakat itu (J. H. Turner, 1991).

Menurut pandangan Parsons dalam (Bagong, 2004:129), pada dasarnya masyarakat cenderung ke arah equilibrium (home statis). Prosesnya terjadi pada penerapan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Sistem tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi pada dasarnya, tiap-tiap sistem memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dan beradaptasi demi pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan demi integrasi.

Terjadinya integrasi sosial antar dua belas anak suku) di Tana Luwu' menurut teori fungsionalisme struktural, apabila seluruh komponen AGIL ini berjalan dengan baik, maka akan tercipta keseimbangan sosial (social equilibrium), yang sama saja dengan integrasi sosial yang harmonis. Dalam paradigma ini pula, norma, nilai-nilai dan konsensus dipandang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat. Oleh sebab itu, masalah sosialisasi, internalisasi dan kontrol sosial menjadi krusial bagi eksistensi dan keberlanjutan masyarakat. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dapatlah dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana bentuk intergrasi sosial dua belas anak suku di Tana Luwu?.

Bertitik tolak dari fenomena itu serta berupaya mencari penyebab dari keharmonisan dua belas anak suku yang terjadi di Tana' Luwu, membuat penulis menelitinya secara lebih mendalam.

Pentingnya masalah yang ingin diteliti ini dilakukan mengingat selama ini, terpeliharanya integrasi sosial pada masyarakat majemuk di Tana' Luwu perlu untuk dijadikan alternatif bahan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan integrasi sosial di antara dua belas anak suku di Tana' Luwu. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menempatkan peneliti menjadi instrumen kritis untuk mengeksplorasi berbagai normasi dan data yang relevan dengan objek ini (Denzin & Lincoln, 2005). Sebagai instrumen krusial, peneliti menerapkan metode dalam penelitian ini dengan mengikuti prosedur seperti yang diusulkan oleh (Miles & Huberman, 1984) dimana pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui dua metode utama: wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan dua belas pemimpin suku dan pemimpin agama serta pemerintah yang diakui di Tana Luwu, bersama dengan perwakilan dari dua belas anak suku di wilayah tersebut. Metode ini dipilih karena para pemimpin tersebut dianggap memiliki pengetahuan khusus yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan pada bidang tindakan tertentu, di mana pengetahuan ini memiliki dimensi sosial yang signifikan dalam membentuk dan menentukan area tindakan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data teknis dan untuk mengamati interaksi antara anggota anak suku, serta kegiatan adat, budaya, dan integrasi sosial yang melibatkan masyarakat Luwu, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah.



Proses reduksi data dilakukan dengan peringkasan, pengkodean, penelusuran tema, dan pembuatan klaster, yang merupakan bagian dari seleksi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan (Miles et al., 2020). Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan akses dan pemahaman terhadap informasi yang telah diorganisir. Penyajian data yang terstruktur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan membuat kesimpulan yang lebih jelas. Kesimpulan diambil secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dan temuan-temuan tersebut dapat dirumuskan menjadi indikator, teori, atau konsep yang memberikan gambaran objektif mengenai objek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kemajemukan penduduk di Tana' Luwu sudah terbangun sejak zaman atau masa kerajaan Luwu' berdiri. Oleh sebab itu, kehadiran masyarakat di Tana' Luwu dapat diterima dengan terbuka, sebab didasarkan pada pandangan atau semboyan masyarakat Luwu yang berbunyi: "siapa yang datang di Luwu' dan sudah bermalam tiga malam, serta minum airnya Luwu' ia sudah menjadi orang Luwu'. Semboyan ini mempunyai maksud "siapa saja yang datang ke Luwu' dan menerima aturan masyarakat (adat dan budaya), maka ia bukan lagi orang asing melainkan sudah menjadi keluarga dan mempunyai hak hidup dengan bebas di dalam masyarakat Luwu', tanpa membedakan suku, agama dan dari daerah mana ia datang.

Dari situlah sudah terjadi interaksi sosial yang baik antara dua belas anak suku yang bermukim di Tana' Luwu. Berdasarkan hubungan itulah juga terjadi pengenalan budaya antara satu dengan yang lain, dari situ

pula juga terjadi adanya ikatan hubungan saling memberi dan menerima nilai-nilai dan norma sosial diantara berbagai pihak. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa menerima kehadiran orang lain secara terbuka adalah kunci utama terbentuknya integrasi sosial.

Kajian tentang masyarakat terbuka ini sesuai dengan tulisan (Geißler, 2008), tentang "Masyarakat Jerman – Modern, Majemuk dan Terbuka" mengungkapkan fakta bahwa Jerman yang berpenduduk sekitar 82 juta orang jauh mendahului negara anggota Uni Eropa lainnya sebagai negara yang paling padat penduduknya. Jerman merupakan negara modern yang terbuka terhadap dunia luar. Masyarakatnya ditandai oleh keanekaragaman gaya hidup dan ciri etnokultur. Bentuk-bentuk kehidupan bersama telah menjadi lebih beragam, sedangkan ruang gerak bagi individu diperluas. Pembagian peran yang berlaku secara tradisional bagi laki-laki dan perempuan telah dilonggarkan. Meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat, keluarga tetap merupakan kelompok relasi sosial terpenting, dan generasi muda memelihara hubungan sangat erat dengan orang tua mereka.

Bingemer dalam masalah integrasi ini mengatakan, bahwa kelompok berada dalam suasana interaksi timbal balik secara terus menerus, sehingga pada akhirnya akan muncul suatu pola yang berbeda dari pola yang asli. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa integrasi interaksional itu meliputi integrasi antar dua belas anak suku di Tana' Luwu dan masyarakat lainnya atau sebaliknya baik dalam bentuk integrasi yang bersifat individual, dengan pengertian sejauh mana anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda itu ambil bagian dalam masyarakat, dan integrasi kolektif yang dengan pengertian sejauh mana



pula anggota-anggota individu masih memperlihatkan partisipasi dalam kelompok etnisnya, dimana pada tingkat-tingkat tertentu kelompok tersebut masih punya kekuasaan terhadap anggotanya.

Karena itulah secara teoritis pula, dapat diambil pengertian, pertama sejauh mana individu masing-masing kelompok menjalin hubungan interaksional timbal balik secara serasi sehingga nampak terpolarisasi dalam berbagai konteks hubungan sosial, sehingga mendorong terciptanya proses-proses integrasi. Ogburn dan Nimkoff dalam (Astrid S, 1979:124-124) mengatakan bahwa, integrasi kolektif akan dicapai bila.

- a. Anggota masyarakat merasa tidak dirugikan dalam kelompoknya, dan bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kerugian.
- b. Apabila terdapat penyesuaian paham terhadap norma, artinya tentang apa dan bagaimana seharusnya orang bertingkah laku, bagaimana tujuan Masyarakat harus dicapai.
- c. Apabila norma-norma yang berlaku tersebut cukup konsisten dan karena membentuk suatu struktur yang jelas

Oleh karena objek dalam interaksi itulah, maka aktor mempunyai disposisi untuk bertindak. Berdasarkan disposisi tersebut, mereka yang terlibat akhirnya sampai pada definisi situasi yang pada gilirannya berguna untuk pemetaan (mapping), dan reinterpretasi, bergantung reaksi lawan interaksi. Thomas, W. I. (1996) *The Definition of the Situation* dalam B. S. Turner, (1999: 248-258) menyatakan, interpretasi itu adalah definisi situasi. Definisi situasi menghubungkan kondisi-kondisi objektif dengan sikap-sikap kepribadian. Dan kondisi-kondisi objektif terdiri dari: nilai-nilai sosial, yang oleh Thomas selanjutnya

didefinisikan sebagai setiap data empiris yang diperoleh oleh anggota-anggota suatu kelompok, dan yang bagi mereka mempunyai arti yang dapat mereka jadikan objek Tindakan. Arti objek itu terletak pada guna yang dapat diperoleh dari objek itu.

Disamping konsep yang diajukan Thomas, maka Mead dalam konsep *The Self*-nya menyatakan, bahwa diri muncul dari interaksi dengan orang lain didalam masyarakat. Tetapi setelah diri tercipta, orang mampu memperlakukan dunia sebagai suatu kesatuan simbolis untuk memberikan makna kepada dunia.

Lebih lanjut menurut Mead, (1934:135-136), bahwa orang bertindak atas dasar interpretasi. Jadi antara stimulus (perangsang) dan respon terletak saat interaksi. Jadi tidak lagi hanya terdapat satu orang yang perannya dimainkan, tetapi sejumlah orang-orang lain yang dijadikan kesatuan. Sebab kelakuan individu dikendalikan oleh orang lain yang digeneralisasikan itu. Karena individu termasuk sebagai anggota kelompok, maka tidak ada orang lain yang digeneralisasikan, pun tidak hanya ada satu diri.

Kemudian yang sangat penting untuk mempercepat proses-proses sosial diantara mereka, adalah peranan dan dukungan yang luas yang diberikan oleh nilai-nilai etika, agama dan budaya masing-masing etnis dalam mendorong terjalinnya hubungan interaksional timbal balik yang serasi dalam mencapai integrasi sosial.

1. Integrasi Sosial Terbentuk Melalui Toleransi

Dalam hubungan secara kedalam dan keluar dua belas anak suku di Tana' Luwu berdasarkan pengamatan tidak mengalami



hambatan, mereka dapat hidup berdampingan dan berintegrasi secara serasi dan harmonis. Hal ini disebabkan, karena kesempatan untuk berperan pada masing-masing kelompok dua belas anak suku di Tana' Luwu sama baiknya, tidak terlihat adanya dominasi anak suku terhadap anak suku lainnya. Otonomi pribadi dihayati tinggi. Prinsip ini juga senantiasa menuntut kerelaan-kerelaan tertentu, artinya untuk meredakan konflik, orang harus bersedia untuk menerima kompromi, harus sering kali rela untuk tidak memperoleh haknya dengan sepenuhnya. (Franz Magnis, 1991: 56-58), tekanan prinsip ini adalah harus mengambil semua keputusan secara mufakat, dan penerapannya dalam semua aspek kehidupan.

Dari beberapa informan 12 (Dua Belas Anak Suku) yang hidup di Tana' Luwu selalu menekankan kebersamaan dalam kegiatan gotong royong, seperti yang terjadi dalam masyarakat Pamona yang tinggal di Tana' Luwu didasarkan pada filosofi "tuwu siwagi, tuwu malinuwu, sintuwu maroso yang diwujudkan dengan ungkapan "mosintuwu pai mosintuwu mate"(saling menolong, memperhatikan, menolong baik dalam kesulitan maupun kesenangan). Ini ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, pernikahan dan kematian dan kegiatan membangun rumah (Hasil Wawancara yang diwancari Luther M, pada 11 November 2022).

Dari adat istiadat yang disebut sebagai contoh tersebut adalah sesuai dengan semboyan Masyarakat Tana' Luwu yang tergambar dalam Logo kedatuan Luwu yang disimbolkan dengan dua sayap yang berjumlah dua belas dan rumbai payung yang juga berjumlah dua belas, yang artinya dua belas anak suku di Tana' Luwu adalah bagian yang tidak terpisahkan, saling menopang dan mendukung satu sama lainnya.

Uraian tersebut dan penjelasan diatas menunjukkan, bahwa kehidupan bersama sangat menjunjung tinggi nilai-nilai

kebersamaan. Kondisi semacam ini sangat berpotensi untuk mendorong proses integrasi sosial, karena perbedaan yang ada diantara mereka tidak merupakan kendala utama untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan antara satu sama lainnya.

Dalam setiap komunitas dua belas anak suku di Tana' Luwu dapat hidup dalam kebersamaan satu dengan yang lainnya. Dari uraian di atas, dapat diambil arti bahwa prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan memberikan kemungkinan kepada warga kelompok dua belas anak suku di Tana' Luwu untuk memperlihatkan sikap sosial dalam hubungan interaksional dengan sesamanya sekaligus harus merelakan kepentingannya.

Di samping itu memasukkan lingkungan sosial dekat ke dalam lingkungan keluarga inti, dapat difafsirkan sebagai usaha sejak semula mencegah timbulnya ketegangan. Mulder, (1989:94) di dalam hasil penelitiannya mengatakan, bahwa dalam suatu masyarakat semua orang mempunyai hubungan kekeluargaan atau setidaknya-tidaknya saling mengenal karena ikatan kemasyarakatan serta agama mempunyai sifat wajib. Penjelasan dan uraian-uraian singkat di atas, dapat menunjukkan bukti nyata akan adanya hubungan interaksional yang positif diantara mereka kelompok dua belas anak suku di Tana' Luwu yang dapat mendorong partisipasi timbal balik yang serasi, sehingga mempercepat tercapainya integrasi sosial.

Integrasi normatif adalah integrasi yang didasari oleh kesepakatan warga masyarakat akan nilai-nilai dasar yang sama, norma dasar yang sama, cita-cita bernegara yang sama. Bangsa ini boleh saja terdiri dari beragam kebudayaan yang berakar dari etnisitas dan agama masing-masing, tetapi harus punya



nilai-nilai dasar yang menyatukan keberagaman itu, dan itu sudah kita rumuskan bersama yaitu Pancasila.

Kita juga harus sepakat bahwa undang-undang Dasar 1945 adalah sumber hukum kita. Bila semua itu terjadi dengan baik, maka kita punya integrasi normatif yang baik. Paulus Wirutomo, (2022:388-389) mengatakan bahwa kenyataannya masih menunjukkan bahwa kesepakatan itu masih bermasalah sampai sekarang. Secara sosiologis integrasi normatif merupakan hasil dari harapan normative (*normatif expectation*) yang mengondisikan para anggota masyarakat sepakat pada nilai-nilai dasar dan cita-cita yang sama.

Durkheim seorang pelopor sosiologi, dengan studinya Integrasinya membedakan antara dua tipe utama yang kontras, yaitu suatu tipe yang menghubungkan integrasi kultural dengan normatif dan tipe kedua yang dicirikan oleh integrasi fungsional. Menurutnya solidaritas mekanik yang dimaksud yaitu suatu integrasi kultural normatif yang merupakan integrasi dari bagian-bagian melalui nilai-nilai dan kepercayaan bersama. Sedangkan Parsons dalam Robert Cooley Angell, (1968:381-382) membicarakan integrasi normatif mengatakan bahwa integrasi normatif dapat dicapai apabila unsur-unsur dasar dalam sistem kultural, yaitu nilai-nilai umum masyarakat diinternalisasikan dalam unsur-unsur struktur dari sistem sosial.

Dari pendapat kedua tokoh tersebut, dapat diartikan bahwa suatu tingkat integrasi normatif yang tinggi merupakan suatu yang baik, karena integrasi mendukung stabilitas sosial yang memberikan arti bagi kehidupan dan tetap menjamin hidupnya dalam sistem sosial. Dan ini mengandung arti bahwa perbedaan nilai-nilai budaya yang ada pada masing-masing kelompok etnis dalam suatu

masyarakat, tidak dipandang sebagai dikhotomi yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai dualisme yang sejajar untuk saling melengkapi dalam sisi kelebihan dan kekurangannya. Disamping itu adanya kemampuan untuk mengadaptasikan diri antara satu dengan yang lain, sekalipun diantara mereka terdapat perbedaan latar belakang sosial merupakan potensi untuk mendorong integrasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai dan norma-norma masyarakat disatu pihak dan penyesuaian (adaptasi) dilain pihak, haruslah ada timbal balik dari masing-masing kelompok etnis, sehingga dengan penyesuaian tersebut, individu akan mampu tidak hanya memasuki suatu masyarakat baru, tetapi juga hidup dengan standar-standarnya dan tidak mungkin ada partisipasi tanpa adanya komunikasi dan perilaku minimum yang konsisten dengan pola yang teratur.

Dari pernyataan tersebut juga memberikan gambaran bahwa nilai sesungguhnya merupakan dasar pokok dari cara hidup individu dan kelompok, sedangkan norma merupakan suatu pedoman bagi mereka dalam berhubungan dengan sesama yang oleh (Ligth & Keller, 1982:60) dikatakan bahwa norma sosial mengatur perilaku, juga memungkinkan seseorang dapat menginterpertasikan ucapan dan tindakan orang lain.

Mengenai kaidah itu, (Geertz, 1961:146) menyebutkan dua macam kaidah, yaitu: *pertama*, dalam setiap situasi, manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik, dan kaidah *kedua*, menunjukkan agar manusia dalam cara berbicara dan membawa diri menunjukkan



sikap hormat kepada orang lain dengan derajat dan kedudukannya.

Tak dapat dipungkiri bahwa terdapat kelompok dominan dan minoritas dalam masyarakat yang tinggal di Tana' Luwu, namun dalam proses interaksi sosial yang terjadi antar dua belas anak suku, berkembang sikap yang saling memahami dan saling menghargai antar individu maupun kelompok yang beranekaragam tersebut yaitu melalui komunikasi yang intensif dan dialogis di antara individu dan kelompok-kelompok yang ada. Ada dua model yang telah dikembangkan dalam membangun toleransi, yaitu: (1) Toleransi dibangun adanya interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif dan upaya membangun kepercayaan di antara masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan perbedaan lainnya; (2) adanya kepercayaan antar kelompok etnik dan aliran.

Yang kedua inilah yang paling penting untuk ditanamkan ke dalam diri setiap masyarakat/kelompok. Rasa saling percaya dan menghargai merupakan langkah utama untuk membangun sebuah toleransi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Siagian et al., 2005) berjudul: "Integrasi sosial hidup bermasyarakat antaretnik pada masyarakat kota Medan dalam perspektif ketahanan nasional". Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga *studi Center of Strategic and International Studies* tahun 2012, yang menunjukkan toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah.

2. Integrasi Sosial Terbentuk Melalui Pemerataan Ekonomi

Nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat tercermin dalam berbagai aspek, seperti: nilai yang terkandung dalam aktivitas tolong menolong, sedkahan/selamatan, gotong royong, pergaulan, sopan santun dan sebagainya. Yang berbeda dari satu kelompok dengan kelompok lain dalam kehidupan bersama sebagai suatu komunitas sosial yang dimasyarakat Luwu tercermin dalam semboyan (Mattata, 1967:91-94) "*mailu sipakainge, rebba sipatokkong, mali sipareppe*" artinya, jika keliru ingat-mengingat, jika jatuh-bangun membangun, jika hanyut, tadah-menadah. Semboyan yang ke dua ialah "*Misa Kada di Potuo, Pantan Kada di Pomate*" (bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh).

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa, bila partisipasi timbal balik antara individu dalam mendukung aktivitas sosial yang diprakarsai individu pada salah satu kelompok etnis atau tingginya partisipasi warga masyarakat dua belas anak suku itu untuk mendukung aktivitas sosial yang diprakarsai oleh pemerintah desa, maka aktivitas sosial tersebut berfungsi sebagai sarana sosialisasi untuk mencapai derajat integrasi normatif yang diinginkan.

Diharapkan warga masyarakat yang ada tidak terkotak-kotak dan terpolarisasi disesuaikan dengan asal-usul dan agama yang dianut, maka sosialisasi adalah amat berperan, sebab kalau tidak maka kegiatan-kegiatan sosial yang ada hanya berfungsi memperkuat solidaritas etnis dan agama, yang sewaktu dapat menimbulkan benturan antara mereka. Maka disinilah pentingnya sosialisasi dan pengenalan secara komprehensif dan konsisten seseorang kedalam dunia objektif yang disebut masyarakat. Sebab, hanya melalui sosialisasi, seseorang bisa menjadi anggota masyarakat dan diikutsertakan dalam dialektika.



Menurut (Berger & Luckmann, 1966:151) dialektika itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan yakni: eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia). Objektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang mengalami proses institusionalisasi), dan internalisasi, dimana individu mengidentifikasi diri dengan organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Bagi Mulder, (1989:31) menekankan bahwa melalui proses sosialisasi ini dapat dibentuk pandangan dan sikap hidup individu dan kelompok untuk memasuki suatu kehidupan yang lebih luas. Dan ini terlihat dalam padangan orang Luwu' yang tercermin dalam praktek dan keyakinan agama dengan maksud untuk mengerti dengan lebih jelas hubungan diantara pandangan hidup dan sikap hidup.

Kiranya mengenai pandangan hidup dan sikap hidup yang dikemukakan oleh Mulder di atas, tidak hanya berlaku pada masyarakat dua belas anak suku di Tana' Luwu saja tetapi juga berlaku di masyarakat pada umumnya yang tinggal di Tana' Luwu. Karena pandangan hidup merupakan suatu abstraksi dari pengalaman, dan dibentuk oleh suatu cara berpikir dan cara merasakan tentang nilai-nilai, organisasi sosial, kelakuan, peristiwa dan segi lain dari pengalaman, yang lama kelamaan melembaga dalam masyarakat.

Dan ini berarti bahwa usaha masyarakat untuk melembagakan pandangan hidup atau pengetahuan tentang masyarakat akhirnya mencapai tingkat generalisasi yang paling tinggi dimana dibangun suatu dunia arti simbolik yang universal, yang dinamakan pandangan hidup. Pandangan hidup yang diterima umum itu dibentuk untuk menata dan memberi legitimasi pada konstruksi sosial yang

sudah ada serta memberikan makna pada pelbagai bidang pengalaman mereka sehari-hari. Lanjut (Berger & Luckmann, 1966:110) menekankan bahwa legitimasi disini dilihat sebagai proses penjelasan dan pembenaran dari suatu interaksi antar individu. Legitimasi adalah penting karena disatu sisi memberi nilai kognitif pada makna dunia Lembaga, sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan dari lembaga mendapat status norma, dan disisi lain memberi nilai yang bercorak normatif, sehingga terlihat suatu sistem nilai dan sistem pengetahuan.

Penjelasan di atas menyatakan, bahwa harus ada hubungan interaksionisme timbal balik yang serasi, sehingga memungkinkan terjadinya partisipasi tanpa adanya interkasi, karena hanya dalam interaksi terjadi tindakan interpertasi yang saling berkaitan dan saling menyesuaikan antara satu sama lain untuk mendorong terciptanya integtasi normatif. Disamping itu dengan terjalinnya hubungan interkasi timbal balik di antara mereka akan memberikan makna dan kemudian saling menyesuaikan tindakan menjadi kesamaan tindakan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sebab manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif mempengaruhi proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif).

Integrasi fungsional adalah integrasi yang memiliki manfaat fungsional, yaitu menyejahterakan seluruh rakyat secara adil dan merata. Reformasi telah berhasil meluncurkan program otonomi daerah yang diharap bisa memberikan kesempatan daerah untuk mengembangkan diri secara otonom, sehingga fungsi integrasi nasional dirasakan oleh masyarakat luas. Integrasi fungsional ini didasarkan pada kerangka persfektif fungsional,



tetapi penekanannya pada ketergantungan fungsional pada masyarakat yang memiliki diferensiasi sosial atau tingkat spesialisasi yang semakin tinggi.

Paulus Wirutomo, (2022:389-390) integrasi fungsional tidak berjalan dengan baik bila salah satu unsur menguasai banyak fungsi, sementara unsur lainnya tidak memiliki fungsi yang berarti (*inequality, social exclusion, dsb*). Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Angell mengatakan, bahwa tipe integrasi ini dicapai melalui interdependensi; bagian-bagian dari keseluruhan pelayanan timbal balik maupun bagian-bagian dari suatu organisme, dan Angell, (1968:138) sendiri berpendapat, bahwa tipe integrasi ini dicapai jika terdapat saling ketergantungan diantara unit-unit dari suatu sistem sosial. Dan sisi lain (Landecker, 1951:132) berpendapat, bahwa tipe ini, integrasi dapat dicapai dalam pengertian pertukaran pelayanan atau pembagian kerja diantara orang-orang.

Masalah sosial ekonomi berkaitan dengan kondisi masyarakat ditinjau dari permasalahan keagamaan, pendidikan, kesehatan, jenis pekerjaan dan penghasilan. Seringkali permasalahan sosial ekonomi menjadi faktor utama terjadinya konflik sosial pada masyarakat majemuk. Beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti konflik Poso, Ambon, Papua, apabila ditarik benang merah dari setiap kejadian terjadinya konflik sosial yang begitu besar, semuanya bermula dari adanya kesenjangan bidang sosial ekonomi sebagai akar penyebabnya. Oleh sebab itu, integrasi sosial antar dua belas anak suku di Tana' Luwu dapat terjadi, karena disebabkan adanya kesamaan tingkat sosial ekonomi, beragama, derajat pendidikan, dan jenis pekerjaan dan penghasilan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan sosial sebagai

pemicu terjadinya konflik sosial tidak terjadi. Hasil penelitian ini relevan oleh (Cahyono, 2004); (Suparlan, 1999) yang mengatakan konflik sosial disebabkan oleh perbedaan agama, dan adanya marginalisasi ekonomi penduduk pribumi. Ini membuktikan bahwa pemerataan sosial ekonomi memiliki pengaruh kuat terciptanya integrasi sosial.

3. *Integrasi Sosial Dengan Membentuk Pengendalian Sosial*

Integrasi koersif, yaitu integrasi yang diikat oleh adanya kekuatan atau kewibawaan pemerintah yang secara efektif bisa "memaksa" seluruh warga negara untuk terintegrasi. Landasan ini tampak bertolak belakang dengan integrasi normatif, tetapi secara realistis bila suatu negara benar-benar mau terintegrasi, kedua unsur landasan ini memang harus ada dengan suatu keseimbangan proporsional yang ideal. Pada masa Orde Baru, landasan koersif ini memang yang paling banyak diandalkan, sehingga integrasi nasional kita menjadi terasa artifisial, masyarakat terintegrasi karena ketakutan pada pemerintah. Alhasil selama dari 30 tahun rezim itu bisa mengintegrasikan negara secara relatif stabil.

Namun, secara sosiologis tidak bisa dipungkiri bahwa integrasi yang terlalu koersif adalah tidak hakiki dan itu terbukti dari munculnya gerakan reformasi yang menggulingkan rezim ini. Paulus Wirutomo, (2022:390-391), integrasi koersif muncul terutama bukan sebagai hasil dari kesepakatan normatif maupun ketergantungan fungsional dari anggota masyarakat, tetapi lebih merupakan hasil dari kekuatan yang sanggup mengikat individu-individu atau unsur-unsur Masyarakat secara paksa. Koersif (*coercion*) merupakan suatu bentuk akomodasi yang dilaksanakan oleh karena adanya paksaan.



Bentuk ini oleh (Young, 1930) dan (Mark, 1974), dikatakan merupakan bentuk akomodasi, dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksananya dapat dilakukan secara fisik (yaitu secara langsung), maupun secara psikologis (secara tidak langsung), misalnya perbudakan, dimana interkasi sosialnya didasarkan pada penguasaan majikan atas budaknya, dimana yang terkahir dianggap tidak punya hak apapun.

Demikian juga pada negara totaliter, mana kala suatu kelompok minoritas yang berada dalam masyarakat memengang kekuasaan. (Soekanto, 1982:84), menekankan bahwa *Coercion* atau koersif, tidak bahwa dengan cara itu tak dicapai hasil yang baik. Dan kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata tradisi Durkeim dan tradisi Fungsionalisme Strukturalnya Parsons, dimana lebih memperhatikan momen objektivasi, bahwa harus diakui adanya eksistensi kenyataan sosial objektif yang ditemukan dalam hubungan individu dengan lembaga-lembaga sosial. Aturan sosial kemasyarakatan atau norma-norma yang melandasi lembaga-lembaga sosial, bukanlah hakekat dari lembaga-lembaga tersebut, tapi norma dan aturan itu merupakan produk dan bautan manusia, produk dari kegiatan manusia. Selanjutnya menurut pendapat Berger, bahwa ternyata ciri "coersive" dari struktur sosial yang objektif merupakan suatu perkembangan aktivitas manusia dalam proses eksternalisasi atau interkasi manusia dengan struktur sosial yang sudah ada.

Di daerah/tempat penelitian ini, perbedaan bidang usaha (tani, perkebunan, kerajinan, perdagangan dan sebagainya) yang terdapat diantara mereka merupakan potensi positif mendorong proses integrasi. Dalam bidang usaha tani khususnya dalam pemamfaatan

lahan usaha tumpang sari atau pun usaha-usaha intensifikasi, penduduk setempat aling belajar bersama, sedangkan usaha perkebunan tanaman keras, terutama sawit, masyarakat dua belas anak suku Tana' Luwu belajar dari komunitas lain yang ada di Tana Luwu. Ketergantungan seperti ini, mempertemukan mereka kedalam relasi-relasi timbal balik yang serasi yang pada gilirannya dapat mempersatukan mereka. Dan seterusnya timbul pertanyaan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang diperlukan supaya proses integrasi itu dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu Mead memberikan jawaban, bahwa prasyarat utama adalah dimilikinya simbol-simbol yang dibagi bersama oleh peserta dalam interaksi.

Bentuk pengendalian sosial baik bersifat preventif maupun persuasif pada masyarakat Tana' Luwu yang majemuk sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dapat dibagi dalam 2 tipe pola pengendalian sosial yaitu : (1) pola lama (tradisional) dan (2) pola baru (modern). Untuk menentukan batas pola lama dan pola baru diukur atau dibatasi dari situasi dan kondisi: kalau pengendalian sosial pola lama dilakukan sebelum terjadinya kasus konflik yang terjadi di Tana' Luwu, sedangkan pola baru pasca terjadinya konflik di Tana' Luwu. Pola pengendalian sosial dalam memelihara integrasi sosial di Tana' Luwu saat ini menggunakan pola baru tanpa menghilangkan pola lama sehingga kedua pola tersebut tetap dipertahankan dan saling mendukung satu sama lainnya. Pola pengendalian sosial yang terjadi di Tana' Luwu sehingga terciptanya integrasi sosial ini tentunya tidak mengabaikan atas prestasi dan kerja keras dari lembaga formal (pihak pemerintah daerah dan Kepolisian).



Kesimpulan

1. Kondisi Kehidupan Masyarakat yang Integral

Masyarakat yang tinggal di Tana' Luwu termasuk majemuk karena didiami oleh beberapa anak suku sehingga tergolong daerah rawan konflik. Dikatakan demikian, karena ditinjau dari karakteristik penduduk memiliki kesamaan dengan daerah yang pernah mengalami konflik. Namun sampai sekarang konflik antar etnik dapat dicegah dan ditanggulangi dan kehidupan masyarakat dapat berjalan damai dan harmonis di Tana' Luwu. Terlihat dari interaksi sosial intra dan inter dua belas anak suku di Tana' Luwu berlangsung melalui berbagai aspek kehidupan seperti: di lingkungan pendidikan, adat-isitiadat, keagamaan, perkawinan, budaya gotong royong dalam lingkungan bertetangga, olahraga, seni, ekonomi, politik, dan pemerintahan.

2. Pola Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial yang terdapat dalam masyarakat berperan serta dalam memelihara dan menjaga agar tidak terjadinya konflik sosial, Terdapat 2 tipe pola pengendalian sosial yang telah dan masih berlangsung yaitu : (1) pola lama (tradisional) dimana pengendalian sosial dilakukan oleh aktor-aktor tradisional (ketua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat) yang belum terorganisir, modal sosial yang dijaga dan dipertahankan serta adanya lembaga-lembaga formal (pihak Kepolisian). (2) pola baru (modern) dilaksanakan selain tetap mempertahankan pola lama tetapi juga melalui pembentukan lembaga-lembaga informal dari masing-masing anak suku sebagai wadah untuk melakukan penyelesaian konflik.

Daftar Pustaka

- Angell, R. C. (1968). *Society Integration, In: International Encyclopedia of The Social*. The Free Press Of New York.
- Astrid S, S. (1979). *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Binacipta, Bandung.
- Bagong, S. (2004). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Baperlu. (2002). *Penyebab Konflik Sosial di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara Sulawesi Selatan, Palopo: Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Luwu*.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality; a treatise in the sociology of knowledge*, ([1st ed.]). Doubleday,.
- Cahyono, B. (2004). *Konflik Sosial dan Integrasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cooley, C. H. (1909). *Social organization: A study of the larger mind*. Charles Scribner's Sons.
<https://doi.org/10.1037/14788-000>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *Handbook of qualitative research*. Sage Publications Ltd.
- Dewi, O. (2007). Konsep Dasar Keberadaan Masyarakat dan Terbentuknya Integrasi Sosial. *Jurnal Informasi*, 12(3), 1–5. <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/file/s/ea6f62d88e12173df931bd244dab2fd5df>
- Durkheim, E. (1915). *The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology*. In *The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology*. Macmillan.
- Durkheim, E. (1947). *The division of labor in society* /. The Free Press,.
- Elly M, S., & Usman, K. (2011). *Pengantar*



- sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial teori aplikasi dan pemecahannya. Kencana Prenada Media Group.
- Geertz, H. (1961). *Javanese family ; a study of kinship and socialization*. The Free Press of Glencoe.
- Geißler, R. (2008). *Masyarakat Jerman – Modern, Majemuk dan Terbuka*. www.tatsachen-ueber-deutschland.de
- Landecker, W. S. (1951). Types of Integration and Their Measurement. *American Journal of Sociology*, 56(4), 332–340.
- Ligth, D., & Keller, S. (1982). *Sociologi* (Vol. 3). Alfred A. Knopf, New York.
- Mark, R. W. (1974). *Social Psychology: Sociological Perspectives*. New York: Basic Books.
- Mattata, H. M. S. D. (1967). *luwu dalam revolusi*. Yayasan Pembangunan Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis : a sourcebook of new methods*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. In *TA - TT -* (Fourth edi). SAGE Los Angeles. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/1047532295>
- Mulder, N. (1989). *Individual and society in Java: a cultural analysis*. Gajah Mada University Press.
- Pulubuhu, D. A. T. (2020). *Damai di Bumi Sawerigading*. Gramedia Pustaka Utama.
- Richard, O., & Borin, V. L. (1996). *Mengenal Sosiologi for Beginners*. Bandung : Mizan.
- Siagian, L., Putra, H. S. A., & Efendhy, S. (2005). Integrasi Sosial Hidup Bermasyarakat Antaretnik Pada Masyarakat Kota Medan dalam Perspektif Ketahanan Nasional= Social Integration of Inter-Ethnic Relation in the Society of Medan City in National Resilience Perspective. *Sosiosains*, 18(2005).
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, P. (1999). *Marginalisasi Penduduk Pribumi dalam Pembangunan*. Jakarta: Aditya Bakti.
- Suseno, F. M. (1991). *Etika Jawa: sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. PT. Gramedia.
- Taufik, A., & Leeden, A. C. Van Der. (1986). *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Turner, B. S. (1999). *The blackwell companion to social theory*. Blackwell.
- Turner, J. H. (1991). *The structure of sociological theory* (5th ed). Wadsworth Pub. Co. Belmont, Calif.
- Veeger, K. J. (1990). *Realitas sosial refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*. Gramedia.
- Wirutomo, P. (2022). *Imajinasi Sosiologi: Pembangunan Societal*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Young, K. (1930). Social psychology; an analysis of social behavior. In *Social psychology; an analysis of social behavior*. Crofts.

